



Pemkot Tindaklanjuti Temuan BPK

DPRD Kota Yogyakarta Bakal Klarifikasi ke Eksekutif Soal Piutang Pajak Daerah

YOGYAKARTA – Pemkot Yogyakarta mengklaim telah menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DIY atas piutang pajak daerah tahun anggaran 2016.

Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK DPRD Kota Yogyakarta bakal minta klarifikasi seberapa besar piutang pajak daerah yang telah tertagih tersebut.

"Besok Rabu (31/5) kami jadwalkan klarifikasi lebih ke teknis, tindak lanjut angka-

angka yang jadi temuan BPK. Apakah bisa tertagih, atau tidak. Kalau tertagih, sekarang berapa nilainya," kata Ketua Pansus Pembahasan LHP BPK, Nasrul Khoiri, kemarin.

Pansus mencatat ada 12 item yang berada dalam daftar inventaris masalah (DIM) dengan total mencapai Rp3,5 mi-

liar lebih. Di antaranya adalah wajib pajak hotel tak menyertakan pajak tahun 2016 senilai Rp474,6 juta. Kemudian, pendapatan reklame dari reklame yang tak berizin dan habis masa izinnya yang berpotensi tidak dapat direalisasikan senilai Rp953 juta.

Lalu ada Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang belum diterbitkan pada wajib pajak BPHTB sebesar Rp145 juta, ketidakjelasan wajib pajak (WP) hotel yang berpiutang Rp590 juta, dan belum terselesaikannya pajak Hotel Saphir Rp493,8

juta.

Kemudian ada kios los tutup dan memiliki tunggakan atau kekurangan bayar senilai Rp36,1 juta, piutang retribusi pasar sampai dengan November sebesar Rp493,6 juta, dan bunga kekurangan pembayaran retribusi sebesar Rp26,8 juta. Serta retribusi sampah kurang bayar senilai Rp363,2 juta.

Politikus PKS itu mengatakan agenda rapat pansus besok merupakan pertemuan kedua dengan Pemkot. Yang pertama pada Maret lalu lebih kepada klarifikasi aspek administrasi.

"Dirapat awalkamifokus administrasi, besok masuk substansi temuan potensi loss pendapatan. Kami ingin mengetahui komitmen Pemkot untuk penagihan piutang pajak jangan sampai berlarut-larut. 12 item itu pun hanya beberapa temuan yang angkanya besar-besar," jelasnya.

Sejak awal Maret lalu, pansus tercatat sudah memanggil sejumlah pihak terkait untuk diminta klarifikasinya. Di antaranya tim auditor BPK DIY, jajaran Pemkot, para wajib pajak, hingga Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI)

DIY.

Pansus LHP BPK akan bekerja sampai akhir Mei ini. Nantinya, pansus akan membuat laporan untuk menjadi pertimbangan bagi eksekutif menyusun rencana kerja tahun 2018. Sehingga, persoalan administrasi dan penagihan diharapkan bisa tuntas.

BPK sendiri merekomendasikan agar Pemkot Yogyakarta dalam hal ini BPKAD melakukan tahapan-tahapan penagihan mulai dari penagihan seketika, memberitahukan surat paksa, mengusulkan tindakan pencegahan, hingga pe-

nyitaan aset.

Selain itu, BPKAD juga diminta memperbaiki proses pengawasan dan pengelolaan piutang pajak daerah yang bermasalah agar tidak kedaluwarsa sehingga bisa ditagih di kemudian hari.

Terpisah, Kepala BPKAD Kota Yogyakarta, Kadri Renggono memastikan pihaknya telah menindaklanjuti rekomendasi BPK. Selain aspek administrasi, upaya penagihan juga telah dilakukan. "Besok kami akan paparkan ke pansus," ujarnya.

● **ristu hanafi**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Oktober 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005